

# Pemanfaatan Fitur *Google* untuk Mendukung *e-Government* di Tingkat Desa/Kelurahan

<sup>1</sup>Irmawati Sagala, Yudi Armansyah, Nailil Husna, Wenny Dastina

*Prodi Ilmu Pemerintahan, UIN STS Jambi, Jl. Jambi-Ma. Bulian Km. 16, Muaro Jambi*

E-mail: [irmawati.sagala@uinjambi.ac.id](mailto:irmawati.sagala@uinjambi.ac.id)

**Abstrak** — Meski penerapan *e-government* dalam sistem pemerintahan di Indonesia telah berjalan hampir dua dasawarsa, pada praktiknya, masih banyak satuan pemerintah daerah khususnya desa dan kelurahan yang mengalami kendala teknis. Kendala utama yang dihadapi oleh pemerintahan desa/kelurahan adalah ketersediaan SDM pengelola dan anggaran pendukung penggunaan sistem informasi. Beranjak dari persoalan ini, Prodi Ilmu Pemerintahan bekerjasama dengan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2021, melaksanakan workshop *e-government* bagi pemerintah desa/kelurahan di Provinsi Jambi dengan tema “Pemanfaatan Fitur *Google* untuk Mendukung Penerapan *e-Government* di Tingkat Desa/Kelurahan”. Pemilihan fitur ini dinilai mampu menjawab persoalan keterbatasan anggaran dan kapasitas SDM karena selain fitur *Google* bisa diakses gratis, juga cukup dikenal di masyarakat terutama sejak pandemi Covid-19. Workshop pengantar dilaksanakan selama sekitar empat jam, dengan penawaran pendampingan lanjutan bagi desa/kelurahan yang akan melaksanakan program lanjutan. Selama bulan Agustus-September 2021, workshop dilaksanakan di enam desa/kelurahan yang tersebar di tiga Kabupaten yaitu Tanjung Jabung Timur (satu desa), Muaro Jambi (dua desa), dan Batanghari (dua desa dan satu kelurahan). Pada workshop ini, perangkat desa/kelurahan dibimbing langsung untuk membuat sejumlah layanan administrasi online.

**Kata Kunci** — *e-government*, pemerintahan desa, fitur *google*, tata kelola efektif-efisien

**Abstract** — Although the implementation of *e-government* in the government system in Indonesia has been running for almost two decades, in practice, there are still many local government units, mainly villages and sub-districts, that encounter technical problems. The main obstacle faced by the village/sub-district government is the capacity of human resources and the availability of budgeting to support the use of information systems. Based on this issue, the Government Science Department, in collaboration with the Community Service Program (KKN) of UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi students in 2021, held the *e-government* workshop for villages/sub-districts governments in Jambi Province with the theme "Utilizing *Google* Features to Support the Implementation of *e-Government* at the Village/sub-district Level." The organizer considered these features can overcome the problems of limited budget and human resource capacity because *Google's* features, apart from being accessible for free, are also quite familiar, especially since the Covid-19 pandemic. The introductory workshop takes about four hours, with offers of further assistance for villages/sub-district who will establish an advanced program. During August-September 2021, the workshop was held in six villages/sub-district spread over three regencies, namely Tanjung Jabung Timur (one village), Muaro Jambi (two villages), and Batanghari (two villages and one sub-district). In this workshop, village/sub-district officials are directly guided to create several online administrative services.

**Keywords** — *e-government*, village government, *Google* features, effective-efficient governance

## 1. PENDAHULUAN

Sinyal untuk menerapkan tata kelola elektronik dalam pemerintahan (*e-government*) di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2001 dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia. Dua tahun kemudian, pemerintah secara resmi mengeluarkan kebijakan penerapan *e-government* melalui Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*. Secara konseptual, *e-government* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mewujudkan pemerintahan yang demokratis, serta meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat

[1]. Dalam instruksi presiden di atas dijelaskan bahwa penerapan *e-government* menjadi sebuah kebutuhan dalam menerapkan *good governance*, yang juga sekaligus menjawab tuntutan perkembangan era digital, dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi sebagai *leading sector*-nya [2].

Mengacu pada kebijakan pengembangan *e-government* tersebut, satuan unit kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama di tingkat provinsi serta kabupaten/kota, meluncurkan sistem tata kelola dan layanan digital. Pelaksanaan model tata kelola elektronik ini diatur dalam peraturan perundangan sesuai

dengan level dan cakupan wilayah kerja masing-masing. Wujud penerapan yang paling umum dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah adalah pembuatan *website* dan portal sistem informasi. Meskipun, secara umum realitas penerapan *e-government* masih membutuhkan peningkatan dalam berbagai aspek. Sebuah kajian terhadap dampak penerapan *e-government* terhadap pemberantasan korupsi pada sektor publik di Indonesia dan negara lain misalnya, menyebutkan bahwa penerapan *e-government* masih membutuhkan perbaikan dalam hal pembuatan kebijakan terkait penyediaan infrastruktur komunikasi yang handal, pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan perangkat lunak, serta pengembangan organisasi dan tata kerja pemerintah [3].

Berbeda dengan pemerintahan di atasnya, pemerintahan desa/kelurahan, cenderung berperan pasif dalam pengembangan *e-government* yaitu hanya sebagai penyuplai data dan pengguna portal sistem informasi yang tersedia. Tugas pengembangan sistem informasi yang diamanatkan pada pemerintah dan pemerintah daerah di atas desa/kelurahan menyebabkan konsentrasi sumber daya berada pada level pemerintahan di atasnya [4]. Pemerintahan desa/kelurahan tidak bisa berbuat banyak dalam konteks ini karena faktanya pengelolaan sistem informasi membutuhkan biaya besar dan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki keterampilan khusus. Padahal, peraturan perundangan telah mengamanatkan pemerintah desa untuk mengelola Sistem Informasi Desa yang dikembangkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah [5].

Pada sisi lain, persoalan pandemi Covid-19 telah mendorong eskalasi kebutuhan layanan daring di semua lini. Kebutuhan ini bahkan harus mampu beradaptasi dengan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk penanganan pandemi. Akibatnya, masing-masing satuan kerja harus mampu melakukan inovasi-inovasi dalam menyiapkan tata kelola dan layanan digital berbiaya murah dan mudah diakses. Lemahnya kemampuan ini tentu berpengaruh terhadap penyediaan pelayanan prima oleh desa sebagai ujung tombak pelayanan publik. Sejumlah kajian menunjukkan dengan nyata bahwa implementasi *e-government* dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik [6] [7].

Terjadinya jarak antara tuntutan kebutuhan dengan realitas kemampuan pemerintah desa dalam menerapkan *e-government* tersebut membutuhkan solusi. Sebagai wujud tanggung jawab tridharma perguruan tinggi, Program Studi (Prodi) Ilmu Pemerintahan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mencoba menawarkan solusi alternatif pendukung implementasi *e-government* di desa/kelurahan. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat berupa *workshop e-government* bagi pemerintah desa/kelurahan di Provinsi Jambi.

## 2. ANALISIS SITUASI

Konsep kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berupa *workshop e-government* ini disusun oleh pengelola Prodi Ilmu Pemerintahan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berdasarkan pengalaman yang telah dikembangkan di Prodi selama hampir dua tahun terakhir. Kebutuhan terhadap perangkat pendukung kinerja yang mudah dan murah menyebabkan pengelola Prodi memilih optimalisasi penggunaan fitur-fitur *Google* dalam mendukung tata kelola dan layanan digital. Efektifitas dan efisiensi kerja yang dihasilkan memunculkan pemikiran untuk berbagi pengalaman kepada pemerintahan desa/kelurahan dalam bentuk PkM tematik wilayah kajian Prodi. Metode yang digunakan dalam kegiatan PkM ini adalah *Participatory Action Research* (PAR); metode yang mengarahkan penentuan program berdasarkan analisis permasalahan dengan melibatkan masyarakat terkait dalam bingkai perubahan sosial [8].

Kegiatan PkM sejenis, penggunaan fitur *Google* sebagai pendukung kerja daring yang terjangkau, juga telah dilakukan oleh institusi lain dengan sasaran dan fokus materi yang beragam terutama bidang pendidikan. Salah satunya dilakukan oleh tim Universitas Pendidikan Mataram dengan tema Pelatihan Pemanfaatan *Google Classroom* sebagai Media Pembelajaran Alternatif pada Masa Covid -19 Bagi Guru di SMPN 1 Praya Barat [9]. Kegiatan lain dilaksanakan oleh tim Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pasir Pangaraian dengan tema *Blended Learning dengan Google Classroom for Education* bagi Guru SMA Sederajat di Kecamatan Tambusai Provinsi Riau [10]. Namun, penulis belum menemukan tema PkM ini pada ranah pemerintahan dalam penelusuran kepustakaan.

Untuk mempermudah realisasi program, terutama terkait penghematan anggaran dan tenaga, Prodi menawarkan program kerja sama dengan mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan yang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada bulan Juli hingga Oktober 2021. Kelompok mahasiswa KKN bertugas untuk mengobservasi penerapan *e-government* di desa/kelurahan lokasi KKN, kemudian menawarkan program kepada desa/kelurahan yang membutuhkan. Seluruh persiapan lokasi acara dilakukan oleh kelompok KKN, sedangkan persiapan acara seperti penyediaan materi dan narasumber dilaksanakan oleh pengelola Prodi.

Observasi awal yang dilakukan oleh beberapa kelompok mahasiswa KKN dari Program Studi Ilmu Pemerintahan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menunjukkan bahwa

keterbatasan penerapan *e-government* dirasakan oleh pemerintah desa/kelurahan di berbagai daerah di Jambi. Beberapa persoalan yang mengemuka antara lain:

- a. Kewenangan dan sumber daya pengembangan sistem *e-government* berada pada pemerintahan di atas desa.
- b. Kurangnya kemampuan dan pengalaman aparatur pemerintahan desa dalam penggunaan teknologi informasi pemerintahan.
- c. Masih banyak masyarakat, khususnya golongan tua, yang belum terbiasa dengan layanan digital. Bahkan, di beberapa tempat, masyarakat masih ada yang enggan berurusan ke kantor desa, dan lebih memilih datang ke rumah aparatur desa.

Uraian permasalahan di atas menunjukkan bahwa persoalan penerapan *e-government* yang dihadapi oleh pemerintah desa/kelurahan berada pada tiga ranah masalah yaitu dari sisi kebijakan, kemampuan aparatur pemerintahan, serta kesiapan masyarakat. Dari tiga ranah masalah tersebut, kegiatan PkM difokuskan pada pemecahan masalah kemampuan aparatur pemerintahan dan kesiapan masyarakat. Untuk itu, peserta *workshop* tidak hanya terbatas pada pegawai di kantor desa/kelurahan, namun juga perangkat desa lainnya dan masyarakat di antaranya ketua RT/RW, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Mediasi Desa (LMD), lembaga adat, karang taruna, pengurus masjid, tokoh masyarakat, bahkan perwakilan institusi pendidikan setempat. Sosialisasi kepada masyarakat luas dimasukkan dalam skema program lanjutan.

### 3. SOLUSI DAN LUARAN

Mengacu pada metode partisipatif yang digunakan, maka lokasi kegiatan *workshop* ditetapkan berdasarkan dari kesediaan pemerintah desa/kelurahan atas penawaran kelompok KKN mahasiswa. Muatan *workshop* diarahkan untuk meningkatkan interaksi pemerintah dengan masyarakat dan pegawai di lingkungannya. Jika merujuk pada pembagian ragam *e-government* yang ditulis oleh Rahayu dan Juwono, fokus PkM ini adalah *government to citizen* dan *government to employees* [1].

Perlu ditegaskan bahwa muatan materi kegiatan PkM ini adalah solusi alternatif terhadap keterbatasan yang dihadapi oleh pemerintah desa/kelurahan. Meski didesain sebagai solusi alternatif, penggunaan fitur-fitur ini juga akan bermanfaat dalam pengembangan sistem informasi ke depannya. Program ini juga dapat dinilai sebagai bagian dari gerakan inisiatif dari bawah dalam konteks pemanfaatan internet di desa [4]. Dengan demikian, ketika pemerintah desa sudah memiliki kemampuan untuk mengembangkan sistem informasi sendiri dengan pengelolaan *website*, berbagai kendala yang dihadapi oleh daerah lain [11] sudah bisa diantisipasi.

Selama rentang waktu bulan Agustus hingga September, *workshop* dilaksanakan di enam lokasi,

dengan level implementasi *e-government* yang berbeda-beda. Keenam lokasi tersebut dan gambaran pesertanya diuraikan dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1. Lokasi dan Peserta *Workshop*

Desa/Kelurahan	Kabupaten	Peserta
Rantau Rasau	Tanjatim	Pegawai kantor desa, ketua RT, tokoh masyarakat
Marosebo	Muaro Jambi	Pegawai kantor desa, ketua RT, tokoh masyarakat, karang taruna.
Sungai Baung	Batanghari	Pegawai kantor desa, Kadus, ketua RT, karang taruna, BPD, lembaga adat, perwakilan sekolah
Teluk	Batanghari	Pegawai kantor desa, ketua RT, LMD
Senaung	Muaro Jambi	Pegawai kantor desa, ketua RT, lembaga adat, BPD
Teratai	Batanghari	Pegawai kantor lurah, LMD, Kadus, ketua RT, lembaga adat

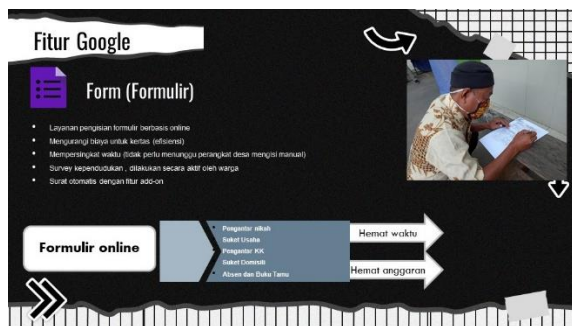
Sumber: data primer

Materi disusun standar untuk semua daerah dengan tim narasumber yang terdiri dari empat hingga lima orang per lokasi. Tim narasumber mengikuti *coaching* yang dilaksanakan Prodi sebelum kegiatan. *Coaching* ini merupakan langkah penting untuk menjamin standar pelaksanaan *workshop*. Prodi menyiapkan 11 orang narasumber yang bertugas secara bergantian sesuai dengan ketersediaan waktu.

Muatan *workshop* berfokus pada penguasaan fitur-fitur *Google* oleh peserta sehingga siap untuk digunakan di instansi tempat bertugas. *Workshop* dimulai dari penyampaian materi secara umum lalu praktik. Adapun materi yang dibahas mencakup:

- a. Urgensi penerapan *e-government* dengan fitur mudah dan murah di desa/kelurahan.
- b. Pengenalan fitur-fitur *Google* dan kegunaannya dalam administrasi perkantoran.
- c. Praktik pengelolaan *google drive* untuk arsip digital berbagai jenis data desa/kelurahan.
- d. Praktik pengelolaan *google form* untuk formulir administrasi, presensi pegawai, buku tamu, survey, sensus penduduk, dan lainnya.
- e. Praktik perubahan format *link google form* ke dalam bentuk *barcode QR*.

- f. Praktik penggunaan *google docs*, *spreadsheet* dan *slide* untuk rapat daring asinkron.



Gambar 1. Tampilan slide materi workshop

Secara umum, peserta dan aparatur pemerintah merespons positif kegiatan *workshop*, baik dari aspek substansi materi maupun teknis pengelolaan *workshop*. Suasana *workshop* berjalan lancar dengan partisipasi aktif peserta terutama pada sesi praktik penggunaan fitur-fitur yang dipelajari. Pada sesi ini, tim narasumber dibantu mahasiswa KKN memberikan asistensi langsung terhadap pekerjaan peserta di perangkat masing-masing.



Gambar 2. Suasana workshop di Desa Sungai Baung

Secara keseluruhan, pelaksanaan PkM ini memberi ruang partisipasi kepada kedua mitra dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, partisipasi mitra dimulai dari perencanaan, penjadwalan, penentuan tempat kegiatan, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi kegiatan. Hal tersebut dilakukan agar mitra mampu merancang, mengelola dan mengembangkan program secara mandiri setelah PkM ini berakhir.

Setelah pelaksanaan kegiatan, pengelola *workshop* menyebarkan formulir evaluasi yang diisi oleh salah seorang perwakilan aparatur pemerintahan desa/kelurahan. Hasil evaluasi kegiatan disajikan dalam tabel 2 berikut:

Tabel 2. Rangkuman Evaluasi *Workshop*

Aspek	Uraian
Kesesuaian tema dengan kebutuhan	Dari interval nilai 1-5, rerata jawaban kesesuaian tema dengan kebutuhan mencapai nilai 4,5
Daya tarik penyampaian materi	Dari interval nilai 1-5, rerata jawaban daya tarik penyampaian materi mencapai nilai 4,25
Serapan materi oleh peserta	Dari interval nilai 1-5, rerata jawaban serapan materi oleh peserta mencapai nilai 4,25
Rencana tindak lanjut penerapan materi <i>workshop</i> di institusi	100% daerah berencana menerapkan materi <i>workshop</i> di instansi terkait pasca-kegiatan

Sumber: data primer

Berdasarkan evaluasi kegiatan tersebut, kegiatan *workshop* ini layak untuk dilanjutkan menjadi program PkM rutin Prodi Ilmu Pemerintahan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan pengembangan pada materi *workshop* dan cakupan peserta. Pengembangan materi ini nantinya bisa mengacu pada pengalaman yang telah diterapkan di kampus, maupun disesuaikan dengan permintaan kebutuhan desa/kelurahan. Pada formula evaluasi kegiatan, ditemukan bahwa desa/kelurahan merencanakan pengembangan portal sistem informasi sendiri dalam peningkatan implementasi *e-government*. Bahkan, Desa Sungai Baung dan Marosebo sudah memiliki rencana untuk menargetkan menjadi desa digital. Untuk pengembangan ini, semua desa menyatakan kemungkinan dalam melanjutkan kerja sama dengan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

#### 4. KESIMPULAN

Sebagai sebuah tuntutan dan kebutuhan, pengembangan penerapan *e-government* mudah-hemat membutuhkan kreatifitas dari aparatur pemerintahan. Optimalisasi fitur-fitur gratis seperti *google* adalah salah satu pilihan alternatif yang layak diambil. Sebagai sebuah sistem pendukung (*supporting system*), penggunaan fitur-fitur ini berdampak terhadap efektifitas dan efisiensi kerja serta mendukung untuk operasional portal-portal sistem informasi yang dibuat oleh pemerintah dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil evaluasi *workshop*, peserta merasakan manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan dan siap untuk menerapkannya di institusi masing-masing. *Workshop* ini juga membuka peluang pengembangan kerja sama

antara UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan pemerintahan desa/kelurahan untuk peningkatan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan dalam implementasi *e-government*.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, serta mahasiswa program Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi atas dukungan terhadap program ini baik dalam bentuk kebijakan, tenaga, maupun biaya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada desa/kelurahan sebagai mitra pelaksanaan program.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Y. . Rahayu and V. Juwono, *Birokrasi & Governance: Teori, Konsep, dan Aplikasinya*. Depok: RajawaliPers, 2018.
- [2] “Kementerian PPN/Bappenas :: Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.”  
<https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/produk-hukum-peraturan-perundangan/inpres/inpres-no3-tahun-2003-tentang-kebijakan-dan-strategi-nasional-pengembangan-e-government/> (accessed Oct. 23, 2021).
- [3] L. Hardjaloka, “STUDI PENERAPAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA DAN NEGARA LAINNYA SEBAGAI SOLUSI PEMBERANTASAN KORUPSI DI SEKTOR PUBLIK,” *J. Rechts Vinding Media Pembn. Huk. Nas.*, vol. 3, no. 3, pp. 435–452, Dec. 2014, doi: 10.33331/RECHTSVINDING.V3I3.35.
- [4] D. Praditya, “The Utilization of Information and Communication Technology (ICT) by Government in Rural Level,” *J. Penelit. Komun.*, vol. 17, no. 2, pp. 129–140, Dec. 2014, doi: 10.20422/JPK.V17I2.12.
- [5] “UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa [JDIH BPK RI].”  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014> (accessed Oct. 27, 2021).
- [6] D. R. Aprianty, “Penerapan kebijakan e-government dalam peningkatan mutu pelayanan publik di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda,” *eJournal Ilmu Pemerintah.*, vol. volume 4, no. 4, p. hlm. 1593-1602, 2016.
- [7] R. F. Nurita, “PENERAPAN LAYANAN E-GOVERNMENT DALAM PERWUJUDAN,” vol. 7, no. 2, pp. 238–246, 2016.
- [8] A. Rahmat and M. Mirnawati, “Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat,” *Aksara J. Ilmu Pendidik. Nonform.*, vol. 6, no. 1, pp. 62–71, Jan. 2020, doi: 10.37905/AKSARA.6.1.62-71.2020.
- [9] T. Terasne, D. Permana, A. Salim, I. M. P. Utama, and A. Hanan, “Pelatihan Pemanfaatan Google Classroom Sebagai Media Pembelajaran Alternatif Pada Masa Covid -19 Bagi Guru,” *Sasambo J. Abdimas (Journal Community Serv.*, vol. 2, no. 3, pp. 95–100, Oct. 2020, doi: 10.36312/SASAMBO.V2I3.232.
- [10] B. Yanto, A. Setiawan, and R. Husni, “PKM Blended Learning dengan Google Classroom for Education bagi Guru SMA Sederajat di Kecamatan Tambusai Provinsi Riau,” *QALAMUNA J. Pendidikan, Sos. dan Agama*, vol. 12, no. 1, pp. 15–24, Feb. 2020, doi: 10.37680/QALAMUNA.V12I01.209.
- [11] W. Warjiyono and C. M. Hellyana, “Pengukuran Kualitas Website Pemerintah Desa Jagalempeni Menggunakan Metode Webqual 4.0,” *J. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput.*, vol. 5, no. 2, pp. 139–146, May 2018, doi: 10.25126/JTIK.201852666.

